

Katalog: 4102004.3205

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN GARUT**

2018

<https://garutkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN GARUT**

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN GARUT**

2018

<https://garut.bps.go.id>

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Garut 2018

Nomor Publikasi : 32050.1847
Katalog BPS : 4102004.3205
ISSN : -
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 70 halaman

NASKAH :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS Kabupaten Garut

PENYUNTING :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, BPS Kabupaten Garut

GAMBAR KULIT :

DITERBITKAN OLEH:

@ BPS Kabupaten Garut

Dilarang Mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik (UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b)

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN GARUT 2018

Pengarah : Berdikarjaya

Editor : Tris Subhianto

Penulis : Kosman
Imas Damasih Suropto
Anita Yulinar

Pengolah Data/
Penyiapan Draft : Firman Hadian

<https://garutkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nyalah publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Garut Tahun 2018 ini bisa diterbitkan.

Publikasi ini berisi indikator-indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Garut yang mencakup bidang Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan, dan Sosial.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan publikasi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharap kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga publikasi ini dapat terselesaikan. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Garut, November 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Garut,



Berdikarjaya, SE, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	xi
1 PENDAHULUAN.....	1
2 KEPENDUDUKAN.....	9
3 KESEHATAN.....	20
4 PENDIDIKAN.....	30
5 KETENAGAKERJAAN.....	43
6 TARAF DAN POLA KONSUMSI.....	51
7 PERUMAHAN.....	56
8 SOSIAL LAINNYA.....	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
KEPENDUDUKAN	
Tabel 2.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2014-2017	11
Tabel 2.2 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Garut, 2013-2017	14
Tabel 2.3 Persentase Wanita 10 Tahun ke Atas dan Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Garut, Tahun 2017	17
Tabel 2.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Berstatus Kawin dan Alat/Cara Kontrasepsi yang Digunakan di Kabupaten Garut, 2016-2017	18
KESEHATAN	
Tabel 3.1 Persentase Anak Usia 0-23 Bulan yang Pernah Disusui dan Rata-rata Lama Disusui di Kabupaten Garut, Tahun 2017	24
Tabel 3.2 Persentase Anak Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Garut, 2016 dan 2017	25
Tabel 3.3 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Penolong Kelahiran Anak yang Terakhir di Kabupaten Garut, 2016-2017	27
Tabel 3.4 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Garut, 2016-2017	28

PENDIDIKAN

Tabel 4.1	Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2016 dan 2017	33
Tabel 4.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2016 dan 2017	37
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2016 dan 2017	40
Tabel 4.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Berumur 7-18 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2016 dan 2017	41

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Tabel 6.1	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Garut, 2016 dan 2017	52
Tabel 6.2	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Garut, 2016 dan 2017 (Rupiah)	54
Tabel 6.3	Indeks Gini Rasio Kabupaten Garut, 2015 – 2017	55

PERUMAHAN

Tabel 7.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Garut, Tahun 2017	58
Tabel 7.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Garut, Tahun 2017	60
Tabel 7.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Garut, Tahun 2017	62

SOSIAL LAINNYA

Tabel 8.1	Persentase penduduk yang Melakukan perjalanan di Kabupaten Garut, 2015 dan 2017	64
Tabel 8.2	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Garut, 2016-2017	66

<https://garutkab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
KEPENDUDUKAN	
Grafik 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2017	11
Grafik 2.2 Perkembangan Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Garut Periode 2001-2017	13
KESEHATAN	
Grafik 3.1 Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Garut, 2013-2017	22
Grafik 3.2 Persentase Penolong Kelahiran Balita di Kabupaten Garut, Tahun 2017	26
PENDIDIKAN	
Grafik 4.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) (tahun) di Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat, 2015-2017	35
Grafik 4.2 Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) (tahun) di Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat, 2015-2017	36
KETENAGAKERJAAN	
Grafik 5.1 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Dan Angkatan Kerja di Kabupaten Garut, 2017	45
Grafik 5.2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Wilayah di Kabupaten Garut, Agustus 2017 (persen)	46
Grafik 5.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Wilayah	

Tempat Tinggal Di Kabupaten Garut, Agustus 2017	47
Grafik 5.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Wilayah Tempat Tinggal Di Kabupaten Garut, Agustus 2015 dan 2017	66
Grafik 5.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Wilayah Tempat Tinggal Di Kabupaten Garut, Agustus 2015 Dan 2017	49

<https://garutkab.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat adalah tujuan utama pembangunan suatu daerah yang berkesinambungan. Tujuan tersebut dapat tercapai secara maksimal jika didukung dengan landasan yang kuat. Dukungan informasi dan data yang menggambarkan hal-hal yang benar tentang fenomena yang sedang terjadi serta disajikan tepat pada waktunya sangat penting, agar pembangunan yang dilaksanakan dapat terarah dan tepat sasaran

Salah satu informasi yang diperlukan dan terkait dengan pembangunan masyarakat adalah data statistik yang menggambarkan tentang kondisi kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan data statistik yang menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu daerah sangat diperlukan untuk mengarahkan perencanaan pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat guna, dan tepat sasaran. Indikator sosial atau Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) di Kabupaten Garut, secara khusus menyajikan kumpulan data statistik yang diharapkan mampu memberikan gambaran sampai sejauh mana perkembangan kesejahteraan penduduk yang telah dicapai, sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Isi Inkesra ini masih bersifat makro mengingat sangat luasnya dimensi cakupan kesejahteraan. Namun demikian, buku ini diharapkan banyak membantu dalam analisis sosial ekonomi kesejahteraan penduduk baik untuk kepentingan perencanaan pembangunan maupun untuk kepentingan

pelaksanaan pembangunan dengan berbagai intervensinya guna meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Garut.

I.1 Ruang Lingkup

Kesejahteraan rakyat mengandung makna kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin seluruh rakyat yang berisikan unsur kualitas kehidupan beragama, tingkat pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani serta pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan material masyarakat umumnya. Sedemikian luasnya pengertian kesejahteraan sehingga data statistik ekonomi konvensional seperti pendapatan per kapita masih belum memadai untuk menggambarkan kesejahteraan yang dimaksud.

Pada pengertian yang luas, tidak mungkin untuk menyajikan data statistik secara komprehensif yang mampu mengukur tingkat kesejahteraan penduduk secara paripurna. Indikator yang disajikan pada publikasi ini hanya menyangkut segi-segi kesejahteraan yang dapat diukur (*measurable welfare*), dan statistik sosial merupakan komponen utama dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat .

I.2 Sistematika

Inkesra Kabupaten Garut Tahun 2018 ini terdiri dari 7 kelompok sektoral yaitu : Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan serta Sosial lainnya yang digambarkan dalam tabel dan gambar/grafik beserta uraiannya yang disajikan secara terpisah dan dalam bab masing-masing.

I.3 Sumber Data

Sumber data Inkesra Kabupaten Garut Tahun 2018 adalah hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2010, Survei Sosial Ekonomi Nasional

(Susenas) tahun 2016 dan 2017 serta Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2017. Sumber data tersebut bersifat primer, karena dikumpulkan secara langsung dan diolah oleh BPS.

1.4 Konsep dan Definisi

1.4.1. Rumah tangga dan Anggota Rumah tangga

Rumah tangga dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus.

- 1) **Rumah tangga biasa** adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama satu dapur. Yang dimaksud dengan makan satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu.
- 2) **Rumah tangga khusus**, yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih tidak dicakup dalam Susenas.

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih dianggap bukan sebagai anggota rumah tangga. Orang yang telah tinggal di suatu rumah tangga 6 bulan atau lebih atau yang telah

tinggal di suatu rumah tangga kurang dari 6 bulan, tetapi berniat menetap di rumah tangga tersebut dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Kepala rumah tangga adalah seorang dari sekelompok anggota yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut.

I.4.2 Pendidikan

Sekolah adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.

Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah sekolah, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi.

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki seseorang yang masih sekolah.

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari seluruh penduduk dari berbagai kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

1.4.3 Kesehatan

Sakit adalah menderita banyak penyakit menahun (kronis) atau gangguan kesehatan yang menyebabkan aktivitas kerja terganggu. Walaupun seseorang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi bila tidak mengganggu kegiatannya sehari-hari maka ia dianggap tidak sakit.

Imunisasi adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah dimatikan ke dalam tubuh anak balita dengan cara suntik atau minum dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu pada tubuh.

1.4.4 Ketenagakerjaan

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

(lihat pada "*An ILO Manual on Concepts and Methods*")

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "**baru**", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "**tindakannya nyata**", seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

Setengah Penganggur (*underemployment*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah penganggur terdiri dari :

- **Setengah penganggur terpaksa** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- **Setengah penganggur sukarela** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/ *part time worker*).

Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam kerja yang dilakukan seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu: **Berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar, Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja bebas di pertanian, Pekerja bebas di non pertanian, Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga.**

I.4.5 Konsumsi Pengeluaran Rumah tangga

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran atau konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

I.4.6 Perumahan

Luas lantai adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, jemuran, dan warung (sebatas atap).

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

BAB II KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Series data kependudukan diperlukan untuk mengetahui apakah pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh lapisan masyarakat, terutama pembangunan yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pemerintah telah membuat proyeksi penduduk terbaru berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010.

2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Jawa Barat dan terus menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk Jawa Barat yang besar. Dalam hal jumlah penduduk, Jawa Barat adalah provinsi yang menduduki peringkat pertama di Indonesia dengan jumlah penduduk yang paling banyak (hampir 1/5 penduduk Indonesia). Sedangkan untuk Kabupaten Garut sendiri, jumlah penduduknya menduduki peringkat ke-5 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Jumlah penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2017 berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020 tercatat sebanyak 2,59 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 0,02 juta jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016 yang mencapai 2,57 juta jiwa. Bila dibandingkan dengan tujuh tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010, jumlah penduduk Garut saat ini mengalami peningkatan sekitar 6,87 persen dari jumlah penduduk pada waktu pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010 yang sebesar 2,42 juta jiwa. Dengan kata lain, selama kurun waktu enam tahun terakhir jumlah penduduk Garut telah mengalami penambahan penduduk sebesar 0,17 juta jiwa.

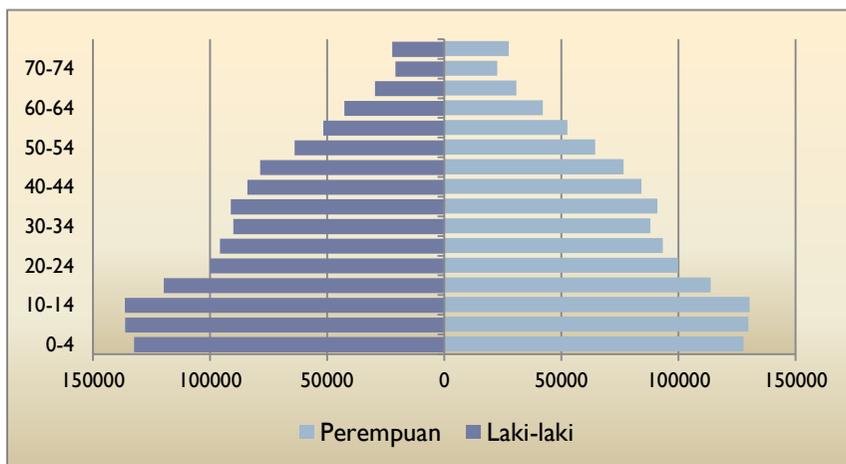
Laju pertumbuhan penduduk Garut pada tahun 2015-2017 tercatat sebesar 1,57 persen. Laju pertumbuhan yang relatif tetap selama tiga tahun terakhir menggambarkan bahwa program pemerintah yang berkaitan dengan pengendalian penduduk cukup berhasil. Hal tersebut perlu ditingkatkan sehingga laju pertumbuhan penduduk bisa semakin dikendalikan setiap tahunnya.

Tabel 2.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2014-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Rasio Jenis Kelamin
2014	2.526.186	0,95	101,76
2015	2.548.723	0,89	101,65
2016	2.569.505	0,82	101,55
2017	2.588.839	0,75	101,43

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Garut pada tahun 2017 sebesar 101.43. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 101.43 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Garut lebih sedikit daripada jumlah penduduk laki-laki. Dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, terdapat 6 Kabupaten/Kota yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100, namun di Kabupaten Garut merupakan salah satu yang sex rasionya diatas 100.

Grafik 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Garut Tahun 2017



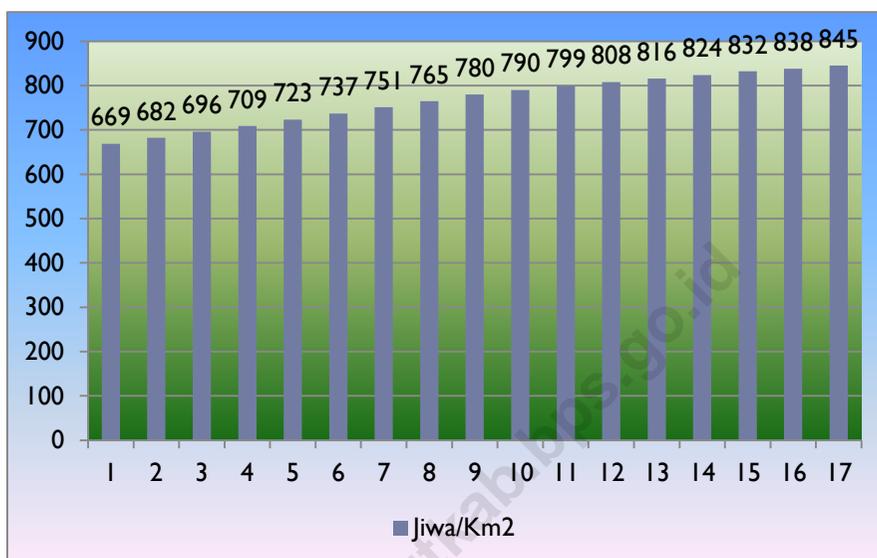
Komposisi penduduk Kabupaten Garut memiliki tipe piramida Ekspansif, yang menggambarkan jumlah penduduk muda lebih besar daripada penduduk usia tua. Jumlah penduduk usia 0-4 tahun, baik laki-laki maupun perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kelompok umur 5-9 tahun. Hal ini menunjukkan pemerintah Kabupaten Garut berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih rendah/ stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kemudian pada *range* kelompok umur 20 sampai 35 tahun cenderung lebih sedikit. Hal tersebut menggambarkan bahwa migrasi pada kelompok penduduk tersebut cukup tinggi. Bentuk piramida penduduk yang cenderung semakin meruncing ke atas menunjukkan bahwa tingkat mortalitas pada usia lansia di Kabupaten Garut masih terbilang tinggi. Pola antara kelompok penduduk laki-laki dan perempuan relatif hampir sama.

2.2 Kepadatan Penduduk

Kendati Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Garut akhir-akhir ini tampak relatif terkendali, namun secara makro jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara di sisi lain secara agregat luas wilayah Kabupaten Garut tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut secara langsung berdampak pada tingkat kepadatan penduduk (*population density*) yang secara otomatis terus menerus mengalami peningkatan. Indikator tingkat kepadatan penduduk ini dapat dijadikan suatu gambaran akan kemampuan suatu wilayah dalam memberikan daya dukung berupa sarana atau prasarana dan daya tampung terhadap penduduk.

Grafik 2.2.
Perkembangan Tingkat Kepadatan Penduduk di
Kabupaten Garut Periode 2001-2017 (Jiwa/Km²)



Kabupaten Garut yang memiliki luas sekitar 3.065,19 km² dengan jumlah penduduk sebesar 2.588.839 jiwa di tahun 2017, maka tingkat kepadatan penduduk pada tahun tersebut tercatat sebesar 845 orang per km². Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2007, dimana jumlah penduduk sebanyak 2.302.891 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 737 orang per km², maka selama kurun waktu sepuluh tahun telah terjadi peningkatan kepadatan penduduk sekitar 108 orang per km². Perkembangan indikator tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Garut selama periode 2001-2017 dapat dilihat dari Grafik 2.2.

2.3 Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus

ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selama periode 2013-2017 angka beban ketergantungan di Kabupaten Garut setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Angka beban tanggungan di Garut sebesar 57.99 persen pada tahun 2017. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban sekitar 58 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Tabel 2.2 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Garut, 2013-2017

Kelompok Umur (tahun)	2013	2014	2015	2016	2017
0-14	31.91	31.91	31.90	30.86	30.52
15-64	62.65	62.64	62.63	63.16	63.29
65+	5.44	5.46	5.47	5.97	6.19
Angka beban ketergantungan	59.62	59.66	59.67	58.31	57.99

Rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030.

Pada periode itu terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Pada Tabel 2.2 juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Garut masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang berdasarkan Proyeksi Penduduk Garut 2010-2020 sekitar 63.29 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Garut menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin bertambah dari 5.44 persen pada tahun 2013 menjadi 6.19 persen pada tahun 2017. Meningkatnya angka beban ketergantungan merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menata program pembangunan agar lebih baik lagi.

2.4 Rata-rata Usia Perkawinan Pertama

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017, di Garut persentase wanita berusia kurang dari 16 tahun yang melakukan perkawinan pertamanya sebesar 20,26 persen. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai usia ideal untuk melakukan perkawinan pertama. Pada usia kurang dari 16 tahun, seseorang masih dapat dikatakan sebagai anak-anak yang belum siap untuk membina sebuah keluarga.

Sedangkan persentase wanita untuk usia perkawinan pertama 16-18 tahun justru data menunjukkan yang paling banyak mencapai 29,90 persen. Sedangkan selebihnya melakukan perkawinan pertama pada usia 20 tahun atau lebih. (Tabel 2.3).

Tabel 2.3 Persentase Wanita 10 Tahun ke Atas dan Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Garut, Tahun 2016-2017

Kelompok Umur (tahun)	2016	2017
≤ 16	24,25	20,26
17-18	28,09	29,90
19-20	23,01	26,75
≥ 21	24,65	23,09

2.5 Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Menurut Prof. Dr. Fasli Jalal, perkembangan cakupan ber-KB dapat dikatakan lamban sehingga membuat laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Indonesia cukup tinggi. Lambatnya kenaikan angka cakupan ber-KB dipicu oleh beberapa faktor. Utamanya adalah masih tingginya kelompok yang tidak terlayani program KB (*unmet need*) dengan berbagai alasan dan kendala. Selain itu adalah semakin kecilnya akseptor KB yang memiliki KB dengan metode jangka panjang, sehingga angka *drop out* KB menjadi tinggi.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2015-2016, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sudah mencapai di atas 50 persen yaitu masing-masing sebesar 63,08 persen pada tahun 2015 dan 56,54 persen pada tahun 2016. Akan tetapi, menurunnya nilai persentase tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah beserta pihak-pihak terkait sehingga program keluarga berencana dalam rangka pengendalian penduduk bisa tetap berjalan sesuai harapan.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunaanya.

Tabel 2.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Berstatus Kawin dan Alat/Cara Kontrasepsi yang Digunakan di Kabupaten Garut, 2016-2017

Alat/Cara KB	2016	2017
MKJP*	22,65	19,12
Non MKJP	77,35	80,77

*MKJP atau Metode Kontrasepsi Jangka Panjang meliputi : Tibektomi/MOW, Vasektomi/MOP, IUD, dan Susuk KB/Implan.

Tabel 2.4 memperlihatkan bahwa Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang paling banyak diminati. Pada tahun 2017, penggunaan Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang mengalami kenaikan menjadi 80,77 persen dari 77,35 persen pada tahun sebelumnya. Sedangkan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang mengalami penurunan, dari 22,65 persen (2016) menjadi 19,12 persen (2017).

<https://garutkab.bps.go.id>

BAB III KESEHATAN

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah; meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

3.1 Derajat dan Status Kesehatan

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. Sumber data analisis untuk harapan hidup, semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Garut telah diiringi dengan peningkatan Angka harapan hidup, tercatat dari berumur 70,47 tahun (tahun 2013) menjadi lebih panjang usia mencapai 70,69 tahun (tahun 2017). Peningkatan angka harapan hidup ini karena sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Bila kita bandingkan dengan nilai angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat, maka dapat dilihat bahwa angka harapan hidup Kabupaten Garut masih dibawah rata-rata. Pada tahun 2017, angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat adalah 72,47.

Grafik 3.1 Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Garut, 2013-2017



Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah

tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit). Hasil Susenas tahun 2017 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Garut mencapai 18,26 persen, sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 29,14 persen.

Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah.

3.2 Tingkat Imunitas Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan ke atas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Tabel 3.1 Persentase Anak Usia 0-23 Bulan yang Pernah Disusui dan Rata-rata Lama Disusui di Kabupaten Garut, Tahun 2017

Rincian	Anak Usia 0-23 bulan yang Pernah Disusui (%)	Rata-rata Lama Disusui (bulan)
Garut	93,66	9,45
Jawa Barat	93,16	10

Hasil Susenas 2017 menunjukkan bahwa dari anak usia 0-23 bulan yang pernah disusui di Garut sebanyak 93,66 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat secara umum, ternyata nilai persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah disusui di Garut pada tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat. Hal ini menandakan bahwa secara umum, jumlah anak usia 0-23 bulan yang pernah disusui di wilayah Garut sudah meningkat (di bawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat).

Dianjurkan seorang ibu dapat menyusui bayinya selama 2 tahun, karena semakin lama bayi mendapatkan ASI akan memberikan kekebalan/proteksi yang lebih kuat. Bila dilihat rata-rata lama bayi disusui pada tahun 2017 maka terlihat rata-rata lama disusui berada pada kisaran bulan 9 di bawah rata-rata lama disusui untuk Provinsi Jawa Barat yaitu di kisaran 10 bulan.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif di mana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Tabel 3.2 Persentase Anak Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Garut, 2016 dan 2017

Imunisasi	2016	2017
BCG	91,61	87,10
DPT	87,58	78,20
POLIO	93,09	86,22
CAMPAK	74,49	64,66
HEPATITIS B	87,06	73,92

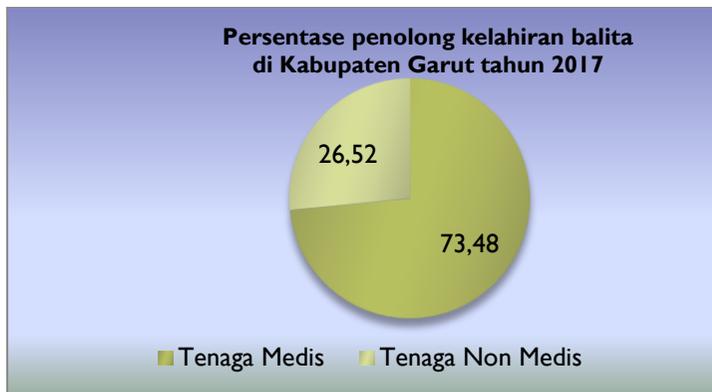
Dalam kurun waktu 2 tahun berdasarkan hasil Susenas 2016 dan 2017, mayoritas anak umur 0-59 bulan (Balita) yang mendapatkan imunisasi wajib secara umum mencapai kisaran di atas 80 persen. Namun, balita yang mendapatkan imunisasi CAMPAK masih di bawah 80 persen dan mengalami penurunan persentasenya, dimana pada tahun 2016 ada sekitar 74,49 persen menurun drastis menjadi 64,66 persen pada tahun

2017. Penurunan yang cukup drastis ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait.

3.3 Pemanfaatan Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Grafik 3.2.



Tabel 3.3 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Penolong Kelahiran Anak yang Terakhir di Kabupaten Garut, 2016-2017

Penolong Persalinan	2016	2017
Tenaga Kesehatan	96,80	91,65
Dokter kandungan	16,23	8,35
Dokter umum	1,82	1,05
Bidan	77,82	64,08
Perawat	0,93	0,00
Tenaga kesehatan lainnya	-	26,52
Bukan Tenaga Kesehatan	3,20	8,35
Dukun beranak	3,20	8,35
Lainnya	-	-

Berdasarkan tabel 3.3, dapat dilihat bahwa usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan sudah di atas kisaran 90 persen yaitu 96,80 persen pada tahun 2016 dan 91,65 persen di tahun 2017. Persentase terbesar penolong persalinan di Garut dilakukan oleh bidan namun selama tahun 2016-2017 mengalami penurunan dari 77,82 persen menjadi 64,08 persen. Untuk penolong persalinan yang dilakukan oleh dokter kandungan juga mengalami penurunan yaitu dari 16,23 persen pada tahun 2016 menjadi 8,35 persen pada tahun 2017. Sedangkan penolong persalinan oleh dukun beranak pada dua tahun terakhir masih berada di kisaran dibawah 10 persen.

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga

kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan.

Peningkatan perubahan sikap masyarakat yang lebih baik ditandai dengan banyaknya penduduk yang berobat ke fasilitas klinik/ praktek dokter bersama pada tahun 2017 sebesar 19,63 persen dan 28,04 persen yang berobat ke puskesmas/pustu. Tempat berobat klinik/praktek dokter bersama, puskesmas/pustu, dan UKBM pada tahun 2017 semuanya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016). Namun tempat rujukan berobat rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, praktek dokter/bidan, praktek pengobatan tradisional dan pengobatan lainnya yang mengalami penurunan, yaitu dari 2,98 persen pada tahun 2016 menjadi 1,63 persen pada tahun 2017.

Tabel 3.4 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Garut, 2016-2017

Tempat Berobat	2016	2017
RS Pemerintah	8,10	6,23
RS Swasta	4,34	2,73
Praktek Dokter/Bidan	46,30	38,30
Klinik/Praktek dokter bersama	11,30	19,63
Puskesmas/Pustu	27,56	28,04
UKBM	3,01	6,30
Praktek Pengobatan Tradisional	3,61	2,11

Lainnya	2,98	1,63
---------	------	------

Secara menyeluruh kondisi penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih mengalami peningkatan yang sangat nyata dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Terjadinya pergeseran dan perubahan penduduk yang berobat dari tenaga kesehatan yang kurang/ tidak terlatih/ tradisional menuju ke tenaga kesehatan yang terlatih secara medis memperlihatkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, juga merupakan indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah bahkan negara.

BAB IV PENDIDIKAN

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

4.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Seseorang dikatakan melek huruf apabila orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin, huruf arab atau huruf lainnya dalam kegiatannya memerlukan kecakapan tersebut dan juga memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca dan menulis untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Program pemberantasan buta huruf sebetulnya sudah berjalan sejak zaman kemerdekaan, namun dalam perjalanannya terjadi pasang surut, bahkan dalam sejarahnya negara Indonesia pernah memproklamkan bebas buta huruf. Tetapi karena tidak dipergunakan keterampilan menyebabkan banyak yang menjadi buta kembali. Program pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketerampilan. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna mengelola sumberdaya yang ada di lingkungannya. Bagi pendidikan persekolahan, diharapkan akan mampu menekan angka putus sekolah di pendidikan persekolahan.

Pada tahun 2017, terjadi peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) Garut bila dibandingkan dengan tahun 2016. AMH naik dari 98,46 persen

menjadi 99,22 persen. Peningkatan AMH juga menunjukkan bahwa angka buta aksara masyarakat menurun dan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan, walaupun minimal hanya dapat membaca dan menulis. Hal ini juga dapat mencerminkan berhasilnya program pemberantasan buta aksara yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Tabel 4.1 Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2016 dan 2017

Jenis Kelamin	2016	2017
Laki-Laki	98,81	99,74
Perempuan	98,10	98,20
Laki+Perempuan	98,46	99,22
Jawa Barat	98,22	95,42

Walaupun program pemberantasan buta aksara menunjukkan berhasil, program ini harus terus dilakukan karena di Kabupaten Garut masih ada sekitar 0,78 persen penduduknya yang buta huruf/ aksara. Angka buta aksara masyarakat harus dapat terus ditekan dan semakin menurun tiap tahunnya. Keberhasilan yang telah dicapai telah menumbuhkan semangat dari pemerintah untuk terus memacu percepatan penurunan angka buta aksara dengan menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, seperti dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan swasta. Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini, pemerintah lebih optimis angka buta aksara akan terus mengalami penurunan.

Berdasarkan jenis kelamin, AMH penduduk laki-laki mengalami peningkatan dari 98,81 persen menjadi 99,74 persen. AMH penduduk

perempuan pada tahun yang sama juga mengalami kenaikan dari 98,10 persen menjadi 98,20 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum AMH laki-laki lebih tinggi daripada AMH perempuan.

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat secara umum pada dua tahun terakhir AMH Kabupaten Garut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai AMH Provinsi Jawa Barat, yang artinya angka melek huruf di Garut lebih baik dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Pencapaian AMH tersebut sudah sangat baik, namun demikian, pemerintah tetap harus terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah. Lebih khusus lagi, pemerintah harus lebih fokus terhadap usia muda, jangan sampai buta huruf baru di usia muda bermunculan dan akan menjadi beban pemerintah di masa mendatang.

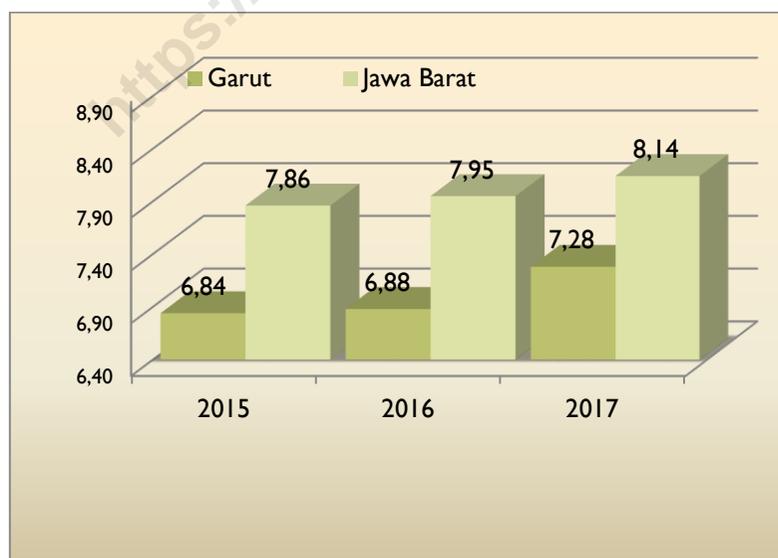
4.2 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Salah satu upaya yang dilakukan

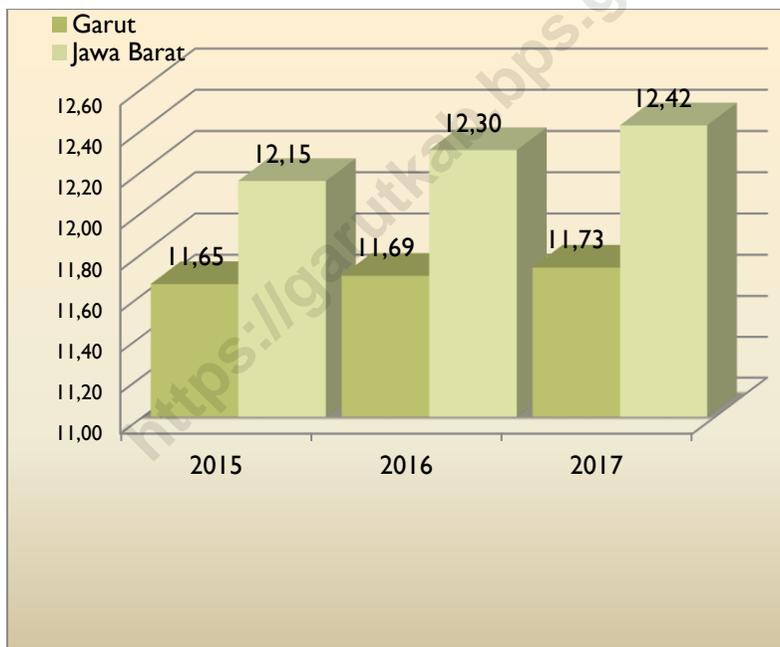
adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan. Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Grafik 4.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) (tahun) di Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat, 2015-2017



Secara umum rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Garut pada tahun 2017 mencapai 7,28 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (6,88 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Garut baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 6 SD atau putus sekolah dikelas I SMP.

Grafik 4.2 Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) (tahun) di Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat, 2015-2017



Angka Harapan Lama Sekolah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan secara berturut-turut 11,65 tahun ; 11,69 tahun dan 11,73 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Garut di bawah rata-rata lama sekolah provinsi (12,42 tahun), juga Kabupaten

Garut menjadi salah satu kabupaten/kota yang rata-rata lama sekolahnya terendah diantara 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

4.3 Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2016 dan 2017

Ijazah yang Ditamatkan	2016			2017		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Tidak Mempunyai Ijazah	8,68	12,02	10,36	10,45	14,90	12,67
SD/Sederajat	51,17	51,10	51,14	43,59	45,50	44,54
SMP/Sederajat	16,72	18,24	17,48	25,80	23,41	24,61
SMA/Sederajat	19,76	14,60	17,18	15,65	11,84	13,75
D1/D2 /D3/sarjana muda	0,66	1,02	0,84	0,88	0,88	0,88
DIV/S1/S2/S3	3,02	3,01	3,01	3,63	3,47	3,55

Pada tahun 2017, penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP ke atas di Garut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan SMP ke atas tahun 2016 mencapai 38,51persen, sedangkan pada tahun 2017 mencapai 42,79 persen. Adapun persentase penduduk dengan ijazah yang ditamatkannya pada tingkat SD/MI/SDLB/ Paket A mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu 51,14 persen pada tahun 2016 menjadi 44,54 persen pada tahun 2017.

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditamatkan, secara umum persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah pendidikan mengalami sedikit peningkatan dari 10,36 persen pada tahun 2016 menjadi 12,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya kesadaran masyarakat bahwa pendidikan sangat penting, sehingga masyarakat kurang aktif berpartisipasi dalam pendidikan. Diharapkan kesadaran masyarakat ini terus meningkat sehingga mampu menurunkan jumlah masyarakat yang tidak bersekolah. Dengan kata lain, masyarakat yang menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pada Tabel 4.2 di atas, tercatat bahwa tingkat pendidikan penduduk laki-laki lebih baik dari perempuan. Hal ini terlihat pada tingkat pendidikan SD ke bawah (termasuk belum tamat SD dan tidak/belum bersekolah), dimana persentase laki-laki mencapai 54,04 persen sedangkan perempuan persentasenya lebih tinggi yaitu 60,14 persen.

Jika kita telaah secara garis besar dapat kita lihat bahwa semakin rendah tingkat pendidikan, persentase perempuan selalu lebih tinggi dari

laki-laki, tetapi mulai SMA/Sederajat ke atas persentase laki-laki menjadi lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini merupakan warisan era masa lalu yang berkaitan dengan kultur budaya kita yang lebih mengedepankan laki-laki dibandingkan perempuan. Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk terus mengkampanyekan pentingnya pendidikan baik laki-laki maupun perempuan.

4.4 Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap khususnya indikator APS dan APM selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Berdasarkan Susenas tahun 2016, Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun mengalami peningkatan. Sebaliknya dengan nilai APS kelompok umur 5-6 tahun dan 16-18 tahun yang justru mengalami penurunan. Secara umum APS penduduk berumur 7-12 tahun sebesar 99,20 persen pada tahun 2016 atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2015 yang sebesar 98,78 persen, sedangkan penduduk berumur 13-15 tahun sebesar 97,20 persen atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 92,47

persen. Sementara itu, APS penduduk berumur 5-6 tahun mengalami penurunan dari 18,00 persen menjadi 15,94 persen. Begitupula dengan APS penduduk pada kelompok umur 16-18 tahun juga mengalami penurunan dari 67,62 persen menjadi 65,15 persen. Peningkatan APS pada beberapa kelompok umur dapat menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat, begitupun sebaliknya.

Tabel 4.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2016 dan 2017

Kelompok Umur/Jenis Kelamin	2016	2017
5-6 tahun		
Laki-laki	14,83	19,67
Perempuan	17,36	32,80
L+P	15,94	25,42
7-12 tahun		
Laki-laki	98,84	98,83
Perempuan	99,54	100
L+P	99,20	99,44
13-15 tahun		
Laki-laki	95,11	93,20
Perempuan	99,34	93,42
L+P	97,20	93,30
16-18 tahun		
Laki-laki	66,29	65,66
Perempuan	63,68	62,41
L+P	65,15	64,08

Jika dilihat menurut jenis kelamin, APS penduduk perempuan terlihat lebih baik bila dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2017,

APS penduduk perempuan pada hampir semua kelompok umur lebih tinggi bila dibandingkan penduduk laki-laki, kecuali APS penduduk perempuan pada kelompok umur 16-18 tahun. APS penduduk perempuan tahun 2017 pada kelompok umur 5-6 tahun sebesar 32,80 persen sedangkan APS penduduk laki-laki sebesar 19,67 persen. APS penduduk perempuan pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 100 persen sedangkan APS penduduk laki-laki sebesar 98,83 persen. Pada kelompok umur 13-15 tahun APS penduduk perempuan sebesar 93,42 persen dan penduduk laki-laki sebesar 93,20 persen. Sementara itu, pada kelompok umur 16-18 tahun, APS penduduk perempuan lebih rendah yaitu sebesar 62,41 persen berbanding 65,66 persen (APS penduduk laki-laki). Perbedaan APS penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya kesenjangan yang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meratanya pendidikan bagi penduduk baik laki-laki maupun perempuan.

Sama halnya dengan APS, Angka Partipasi Murni (APM) pada tahun 2017 justru mengalami peningkatan pada hampir semua jenjang pendidikan. Secara umum APM SD sebesar 98,22 persen mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2016 yang sebesar 97,25 persen. Sebaliknya dengan APM SMP yang justru mengalami penurunan dari 81,85 persen menjadi 77,74 persen. Sama halnya dengan APM SMP, APM SMA juga mengalami penurunan dari 51,99 persen menjadi 49,49 persen. Peningkatan APM menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka, begitupun sebaliknya.

Tabel 4.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Berumur

7-18 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, 2016 dan 2017

Kelompok Umur/ Jenis Kelamin		2016	2017
SD/ sederajat			
	Laki-laki	96,86	97,94
	Perempuan	97,61	98,49
	L+P	97,25	98,22
SMP/ sederajat			
	Laki-laki	84,04	72,69
	Perempuan	79,61	84,21
	L+P	81,85	77,74
SMA/ sederajat			
	Laki-laki	52,43	56,29
	Perempuan	51,43	42,27
	L+P	51,99	49,49

Jika dilihat menurut jenis kelamin, APM SD perempuan terlihat lebih tinggi bila dibandingkan APM SD laki-laki. APM SD penduduk perempuan sebesar 98,49 persen atau berbeda sedikit dengan laki-laki yang sebesar 97,61 persen. Kondisi yang sebaliknya terjadi pada APM SMA. APM SMA penduduk laki-laki justru lebih tinggi daripada perempuan. APM SMP penduduk laki-laki tercatat sebesar 72,69 persen dan penduduk perempuan sebesar 84,21 persen. Sementara itu, pada jenjang pendidikan SMA, APM SMA penduduk laki-laki beda jauh daripada APM perempuan. APM penduduk laki-laki sebesar 56,29 persen berbanding 42,47 persen (APM SMA penduduk perempuan).

Dari gambaran pembahasan APS dan APM di atas masih menunjukkan adanya kesenjangan. Kesenjangan ini diakibatkan oleh layanan pendidikan yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, di samping faktor ekonomi fasilitas layanan pendidikan yang masih belum merata dan sangat terbatas turut menghambat partisipasi pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan akses pendidikan yang merata dan mudah dijangkau masyarakat serta memberikan penyelenggaraan pendidikan yang layak dari segala sisi di seluruh wilayah mulai dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur.

BAB V KETENAGAKERJAAN

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2017 kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/ gaji/pendapatan bersih.

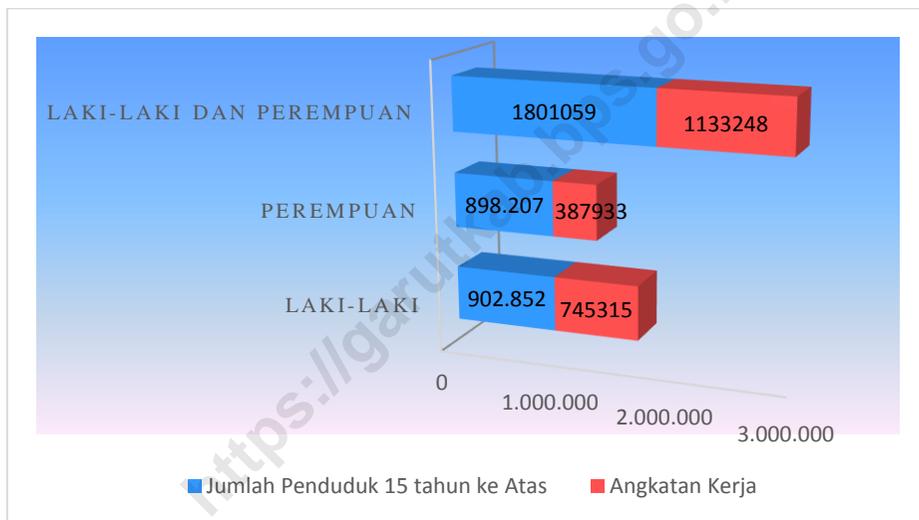
5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kabupaten Garut Agustus 2017 sebanyak 1,80 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja mencapai 0,67 juta orang atau 37 persen dari penduduk usia kerja.

Grafik 5.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja di Kabupaten Garut, Agustus 2017



Sumber : Sakernas, Agustus 2017

Jika dilihat jumlah penduduk usia kerja menurut jenis kelamin pada periode Agustus 2017, jumlah penduduk Laki-laki sebesar 745,3 ribu orang atau sebesar 65,77 persen dari total jumlah penduduk usia kerja. Sedangkan untuk perempuan sebesar 387,9 ribu orang atau 34,23 persen dari total penduduk usia kerja.

Dari total angkatan kerja sebanyak 1.133,2 ribu orang pada Agustus 2017, sebanyak 92,14 persennya melakukan aktivitas bekerja

atau sebanyak 1.044,14 ribu orang. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi.

Jika dilihat menurut wilayah perkotaan dan pedesaan, maka jumlah penduduk bekerja di pedesaan lebih sedikit daripada di perkotaan. Pada keadaan Agustus 2017 jumlah penduduk bekerja di pedesaan mencapai 515,61 ribu orang, ada pun di perkotaan sebanyak 528,53 ribu orang.

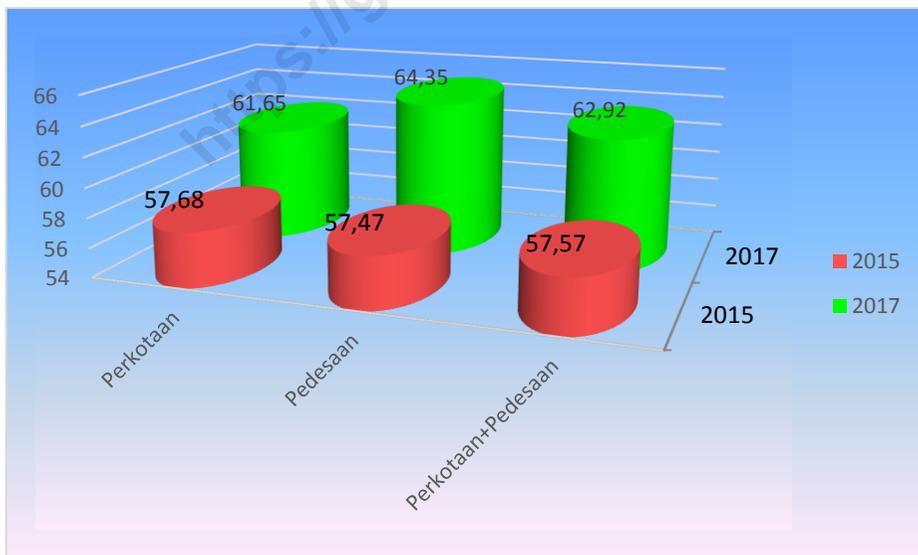
Grafik 5.2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Wilayah di Kabupaten Garut, Agustus 2017



Sumber : Sakernas, Agustus 2017

Pergerakan jumlah angkatan kerja TPAK di perkotaan maupun perdesaan menunjukkan peningkatan. TPAK di daerah perkotaan menunjukkan kenaikan sebesar 3,97 persen dari 57,68 persen pada Agustus 2015 menjadi 61,65 persen di tahun 2017. Demikian pula halnya di perdesaan terjadi kenaikan TPAK sebesar 6,88 persen, dari 57,47 persen pada Agustus 2015 menjadi 64,35 persen pada Agustus 2017. Secara keseluruhan TPAK di daerah perkotaan dan perdesaan meningkat sebesar 5,35 persen, dari 57,57 persen pada tahun 2015 menjadi 62,92 persen pada tahun 2017.

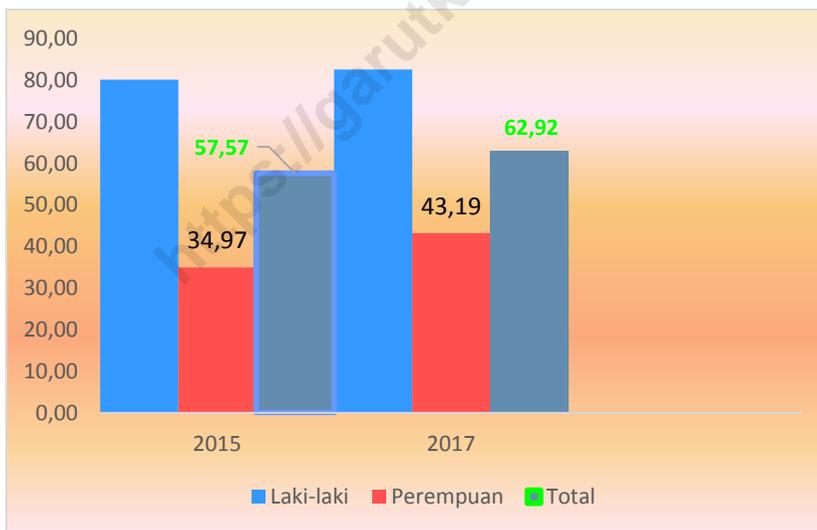
Grafik 5.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kabupaten Garut, Agustus 2015 dan 2017



Sumber : Sakernas, Agustus 2015 dan 2017

Adapun jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa selama periode Agustus 2015 hingga Agustus 2017, TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Keadaan Agustus 2017 TPAK laki-laki di Kabupaten Garut mencapai 82,55 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya mencapai 43,19 persen.

Grafik 5.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Garut, Agustus 2015 dan 2017

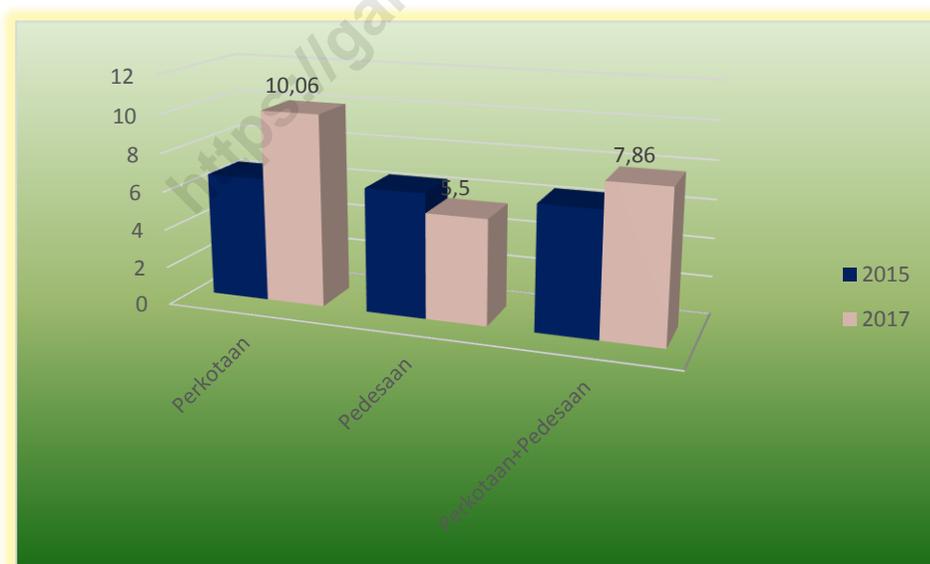


Sumber : Sakernas, Agustus 2015 dan 2017

Seperti halnya TPAK, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di perkotaan keadaan Agustus 2017 di Kabupaten Garut meningkat jika dibandingkan keadaan Agustus 2015. TPT di daerah perkotaan pada

Agustus 2015 naik sebesar 3,56 persen dibandingkan 2017 dari 6,5 persen menjadi 10,06 persen. Adapun di pedesaan TPT turun 1 persen dari 6,5 persen di tahun 2015 menjadi 5,5 persen di tahun 2017. Dengan demikian secara keseluruhan TPT di perkotaan dan pedesaan naik sebesar 1,36 persen dari 6,5 persen di tahun 2015 menjadi 7,86 persen di tahun 2017. Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, Tahun 2017 TPT di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan, dimana TPT perkotaan sebesar 10,06 persen dan di pedesaan sebesar 5,5 persen.

Grafik 4.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kabupaten Garut, Agustus 2015 dan 2017



Sumber : Sakernas, Agustus 2015 dan 2017

Selama periode Agustus 2015 dan Agustus 2017 tingkat pengangguran terbuka laki-laki menunjukkan peningkatan. Keadaan

Agustus 2015 TPT laki-laki mencapai 5,51 persen, kemudian naik 3,61 persen menjadi 9,12 persen pada Agustus 2017. Adapun TPT perempuan pada keadaan Agustus 2015 mencapai 8,78 persen kemudian turun 3,33 persen menjadi 5,45 persen pada keadaan Agustus 2017.

<https://garutkab.bps.go.id>

BAB VI TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/ keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

6.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi

kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 6.1 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Garut, 2016 dan 2017

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp.)		Persen (%)	
	2016	2017	2016	2017
1. Padi- padian	61 730	60 077	9,60	8,79
2. Umbi-umbian	3 446	4 034	0,54	0,59
3. Ikan/ Udang/ Cumi/ Kerang	15 885	20 298	2,93	2,97
4. Daging	17 290	22 523	2,69	3,29
5. Telur dan susu	19 022	18 660	2,96	2,73
6. Sayur-sayuran	22 851	20 818	3,65	3,04
7. Kacang-kacangan	9 395	8 957	1,46	1,31
8. Buah-buahan	14 074	14 001	2,19	2,05
9. Minyak dan Kelapa	9 481	10 133	1,47	1,48
10. Bahan minuman	13 170	14 701	2,05	2,15
11. Bumbu-bumbuan	8 024	6 213	1,25	0,90
12. Konsumsi lainnya	9 286	11 463	1,44	1,69
13. Makanan dan minuman jadi	87 712	120 096	13,64	17,58
14. Rokok	61 657	76 772	9,59	11,24
Jumlah Makanan	355 968	408 746	55,36	59,81
15. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	145 216	130 814	22,59	19,25
16. Aneka barang dan jasa	73 183	61 561	11,38	9,01
17. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	19 535	24 806	3,04	3,63
18. Barang-barang yang tahan lama	29 104	34 785	4,53	5,09
19. Pajak, pungutan, dan asuransi	9 580	9 690	1,49	1,41
20. Keperluan pesta dan upacara	10 362	12 331	1,61	1,80
Jumlah Bukan Makanan	286 981	273 986	44,64	40,19
Total	642 948	682 772	100,00	100,00

Tabel 6.1 di atas menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan 2016 dan 2017. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode 2016-2017 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 642.948,- menjadi Rp 682.772,-. Bila dilihat persentasenya pengeluaran untuk makanan mengalami peningkatan dari 55,36 persen pada tahun 2016 menjadi 59,81 persen pada tahun 2017.

Sebaliknya, pengeluaran bukan makanan menurun dari 44,64 persen menjadi 40,19 persen. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kesejahteraan. Penurunan pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi pada semua jenis pengeluaran, kecuali pengeluaran untuk pakaian, alas kaki dan tutup kepala serta keperluan pesta dan upacara yang meningkat, berturut-turut dari 3,04 persen dan 1,61 persen pada tahun 2016 menjadi 3,63 persen dan 1,80 persen pada tahun 2017. Sedangkan penurunan kontribusi tertinggi dari kelompok makanan disebabkan oleh kelompok komoditi makanan padi-padian, dimana penurunannya mencapai 0,81 persen (9,60 persen menjadi 8,79 persen).

Rata-rata pengeluaran untuk makanan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 4,45 persen dibanding dengan tahun 2016, yaitu dari Rp 355.968,- menjadi Rp 408.746,- per kapita sebulan. Sebaliknya pengeluaran untuk bukan makanan mengalami penurunan sebesar 4,45 persen yaitu dari Rp 286.981,- pada 2016 menjadi Rp 273.986,- pada tahun 2017.

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional. Ketimpangan dalam menikmati hasil

pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Tabel 6.2 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Garut, 2016 dan 2017 (Rupiah)

Golongan Pengeluaran per Kapita	2016	2017
< 150 000	-	-
150 000-199 999	1,39	1,49
200 000-299 999	10,14	13,18
300 000-499 999	40,08	42,80
500 000-749 000	24,34	23,27
750 000-999 999	9,45	6,68
1 000 000-1 499 999	10,54	7,90
1 500 000+	4,06	4,68
Total	100,00	100,00

Pada tabel 6.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, penduduk Kabupaten Garut sebagian besar berada pada golongan pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 499.999,- yaitu sebanyak 42,80 persen (meningkat dari tahun 2016 yang nilainya sebesar 40,08 persen). Selain itu, penduduk yang termasuk ke dalam golongan pengeluaran Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 749.000,- juga cukup banyak yaitu sebesar 24,34 persen pada tahun 2016 dan 23,27 persen pada tahun 2017.

Tabel 6.3 Indeks Gini Rasio Kabupaten Garut, 2015 – 2017

Tahun	Indeks Gini
2015	0,31
2016	0,35
2017	0,37

Kemudian bila dilihat dari Indeks Gini sejak tahun 2015 hingga 2017 terlihat fluktuatif kesenjangan walaupun relatif kecil dari 0,31 pada tahun 2015 kemudian naik menjadi 0,35 pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 0,37 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan antar kelompok relatif sama selama tiga tahun berturut-turut meskipun terlihat tren kenaikan ketimpangan.

BAB VII PERUMAHAN

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketenteraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen no.9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak

huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

7.1 Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan data Susenas 2017, secara umum persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantaikan bukan

bambu/kayu/papan kualitas rendah/tanah sebesar 69,36 persen. Hal ini menunjukkan di Kabupaten Garut masih ada masyarakat yang menempati rumah tinggal yang berlantai kualitas rendah.

Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Garut, Tahun 2017

Indikator Kualitas Perumahan	Persentase
Lantai terluas bukan bambu/kayu/papan kualitas rendah/tanah (%)	69,36
Atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes (%)	99,88
Dinding tembok dan kayu/batang kayu (%)	69,08

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Dari hasil Susenas 2017 rumah tinggal dengan atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes mencapai 99,88 persen. Kondisi bangunan rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas tembok dan kayu/batang kayu sebesar 69,08 persen.

Kriteria rumah sehat lainnya adalah apabila rumah tersebut memiliki luas lantai yang memenuhi kebutuhan ruang setiap anggota rumah tangga. Besarnya kebutuhan ruang per orang ini dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi

aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO, World Health Organization), rumah tinggal yang sehat seharusnya memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan, rumah dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat jika penguasaan luas lantai per orangnya minimal 8 m². BPS sendiri menggunakan batasan 7,2 m² sesuai kriteria yang digunakan dalam MDGs. Di Kabupaten Garut lebih dari 80 persen rumah tangga pada tahun 2017 telah memiliki luas lantai lebih dari 7,2 m².

7.2 Fasilitas Rumah Tinggal

Selain kualitasnya, kenyamanan rumah tinggal juga ditentukan oleh kelengkapan fasilitasnya yang sesuai dengan standar kesehatan. Yang termasuk dalam fasilitas tersebut adalah tersedianya air minum dan sanitasi yang layak, serta adanya penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan memasak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Sedemikian pentingnya ketersediaan fasilitas ini hingga menjadi salah satu target yang harus dipenuhi dalam tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals - MDGs). Target tersebut adalah menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada 2017.

Berdasarkan kriteria yang digunakan dalam MDGs tersebut, rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak adalah rumah tangga yang air minumnya bersumber dari ledeng, air hujan atau dari pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak dari tempat pembuangan limbah (tangki septik) terdekat lebih dari 10 m. Dalam hal ini, menggunakan air kemasan maupun isi ulang untuk minum tidak termasuk memiliki sumber air minum yang layak.

Tabel 7.2
Persentase Rumah Tangga Menurut
Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Garut Tahun 2017

Uraian		Persentase
(1)		(2)
1	Air Minum Bersih	52,89
2	Sumur dan Mata Air Terlindung	59,47
3	Fasilitas Tempat Buang Air Besar:	
	- Ada, digunakan hanya ART sendiri	65,72
	- Ada, digunakan bersama ART rumah tangga lain tertentu.	15,05
	- Ada, di MCK Umum/ siapapun menggunakan	7,44
	- Ada, ART tidak menggunakan/ Tidak ada fasilitas	11,79
	- Total	100,00
4	Sumber penerangan listrik PLN	99,75

Sumber : Susenas 2017 (diolah)

- Catatan : 1) Air yang bersumber dari air kemasan/isi ulang, ledeng, dan dari pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jaraknya ke tempat pembuangan limbah terdekat >10 m
2. Fasilitas tempat BAB sendiri atau bersama, jenis kloset leher angsa dan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran

Pada Tabel 7.2 tampak bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2017 mencapai 52,89 persen. Bila dilihat lagi dengan lebih mendetil terhadap sumber air minum yang digunakan maka terlihat bahwa di Kabupaten Garut 59,47 persen rumah tangganya menggunakan air dari sumur terlindung dan mata air terlindung. Baik sumur terlindung maupun mata air terlindung apabila jarak keduanya dari tempat penampungan kotoran terdekat lebih dari 10 m, maka kedua sumber air minum ini cukup sehat untuk digunakan.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik PLN, karena cahaya listriknya lebih terang dibandingkan sumber penerangan lain. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017, 99,75 persen rumah tangga telah menikmati fasilitas listrik PLN yang berarti hanya sangat sedikit rumah tangga (dibawah 1 persen) yang belum menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama.

7.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup disini adalah rumah milik sendiri, kontrak, dan lainnya (sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya). Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Tabel 7.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Kepemilikan
Rumah Tinggal di Kabupaten Garut, Tahun 2017

	Uraian	Persentase
1	Milik sendiri	86,03
2	Kontrak/sewa	2,88
3	Bebas sewa	10,79
	Total	100,00

Sumber : Susenas 2017 (diolah)

BAB VIII SOSIAL LAINNYA

Perjalanan wisata menjadi salah satu indikator sosial yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, gaya hidup masyarakat juga cenderung berubah dengan melakukan pemenuhan kebutuhan tersier yang salah satunya adalah berwisata. Tujuan melakukan perjalanan wisata biasanya untuk relaksasi, menikmati hari libur, menikmati pemandangan alam dan lain-lain.

Aspek sosial lain seperti akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkau harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis, serta tingkat keamanan wilayahnya. Semakin besar masyarakat

mendapatkan pelayanan kredit usaha semakin mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kesehatan gratis menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Dengan pelayanan kesehatan gratis tersebut masyarakat dapat mengalihkan pendapatannya pada keperluan hidup lainnya guna meningkatkan kesejahterannya.

Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas dan bekerja. Semakin rendah tingkat kejahatan di suatu wilayah menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

8.1 Perjalanan Wisata

Perjalanan wisata yang dijadikan indikator dalam Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dan bukan untuk tujuan memperoleh upah/gaji di tempat yang dikunjungi atau sekolah serta bersifat perjalanan bukan rutin. Selama tahun 2016 jumlah penduduk yang melakukan perjalanan wisata mengalami penurunan 1,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,25 persen pada tahun 2015 menjadi 11,91 persen.

Tabel 8.1 Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan di Kabupaten Garut, 2016 dan 2017

Rincian	2016	2017
Laki-Laki	12,32	20,61
Perempuan	11,51	22,80
L+P	11,91	21,70

8.2 Akses Informasi dan Komunikasi

Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunaanya.

Di tahun 2017 penggunaan telepon seluler meningkat 8,7 persen dibandingkan tahun 2016, dari 56,51 persen menjadi 65,21 persen. Kemudian apabila kita lihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang menggunakan telepon seluler selalu lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2017, baik itu persentase penduduk laki-laki maupun persentase penduduk perempuan yang menggunakan telepon seluler keduanya mengalami peningkatan, dari 62,44 persen untuk laki-laki dan 50,76 persen untuk perempuan, masing-masing meningkat menjadi berturut-turut 68,60 persen dan 61,77 persen. Penggunaan telepon seluler meningkat karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.

Tabel 8.2 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Garut, 2016-2017

Alat Komunikasi	Laki-Laki	Perempuan	L+P
Telepon Seluler			
2016	62,44	50,76	56,51
2017	68,60	61,77	65,21
Komputer			
2016	13,69	12,65	13,16
2017	14,08	11,97	13,04
Akses Internet			
2016	19,45	17,95	18,69
2017	24,46	21,69	23,09

Sementara itu, perkembangan penduduk yang mempunyai akses terhadap komputer pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,12 persen dibandingkan tahun 2016, dari 13,16 persen di tahun 2016 menjadi 13,04 persen di tahun 2017. Aplikasi terhadap teknologi komunikasi dan informasi salah satunya adalah akses internet. Media internet digunakan karena memiliki sifat instan, interaktif dan menarik. Pada tahun 2017, secara umum terjadi peningkatan sebesar 4,4 persen penduduk yang mengakses internet, dari 18,69 persen di tahun sebelumnya menjadi 23,09 persen.

Pada tabel 8.2 dapat dilihat bahwa persentase penduduk laki-laki yang memiliki akses terhadap komputer dan internet selalu lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk perempuan. Pada tahun 2017, persentase penduduk laki-laki yang memiliki akses terhadap komputer dan internet berturut-turut adalah 14,08 persen dan 24,46 persen. Sedangkan

persentase penduduk perempuan yang memiliki akses komputer dan internet berturut-turut adalah 11,97 persen dan 21,69 persen. Selisih persentase penduduk laki-laki dan perempuan relatif kecil. Hal ini menandakan selain dari segi pendidikan, ternyata dari segi akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi pun sudah semakin menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jika akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi biasanya cenderung identik dengan laki-laki, seiring perkembangan zaman, perempuan pun sudah semakin banyak yang mengakses dan menguasai bahkan ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN GARUT**

Jl. Pembangunan No. 222 Telp. & Facs. (0262) 233273 Tarogong – Garut